

# PENGARUH PENGARUSUTAMAAN GENDER INTERNASIONAL TERHADAP INDONESIA KHUSUSNYA DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA

**Rendra Mirni**

Magister Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Yogyakarta, Indonesia  
Email: rendramirni.mihi@gmail.com

**Abstrak-**Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Tujuan utama pengarusutamaan gender adalah mengagendakan secara eksplisit hal-hal yang menjadi masalah bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan saat penyusunan agenda dan intervensi pembangunan.

**Kata Kunci :** *Gender, Pengarus-utamaan Gender, Gender Bougeting*

## I. PENDAHULUAN

Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.

Kesepakatan global dalam merespon kesenjangan gender, yaitu : CEDAW (*Convention on the Elimination of Discrimination against Women*), yakni kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus di rancang untuk melindungi hak-hak perempuan dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender (laki-laki dan perempuan), Beijing Platform of Action, yakni teridentifikasinya 12 bidang yang harus menjadi perhatian dalam pemajuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (antara lain kemiskinan, ekonomi, pengambilan keputusan, lingkungan hidup) dan *Millenium Development Goals* (MDG's) : persamaan gender dalam pengertian kesetaraan dan keadilan gender ditetapkan sebagai salah satu dari delapan sasaran pembangunan MDG's. Hal ini telah melahirkan pengarus-utamaan gender secara global.

Tujuan utama pengarusutamaan gender adalah mengagendakan secara eksplisit hal-hal yang menjadi masalah bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan saat penyusunan agenda dan intervensi pembangunan. Hal

ini membuat agenda kesetaraan menjadi lebih eksplisit, tidak seperti kebijakan-kebijakan 'universal' yang diklaim telah mengagendakan secara implisit hal-hal yang menjadi kepentingan laki-laki dan perempuan.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> ini terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki jumlah penduduk 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km<sup>2</sup>. Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat jumlah penduduk DIY mencapai 3.457.491 jiwa, dengan komposisi 49,43 persen laki-laki dan 50,57 persen perempuan. Penduduk tersebut tersebar di lima kabupaten/kota dengan populasi terbesar terdapat di Kabupaten Sleman dan diikuti oleh Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.

Untuk jumlah rumah tangga di DIY ada sebanyak 959.885 yang terdiri dari populasi laki-laki sebanyak 1.568.096 populasi perempuan sebanyak 1.588.133 jiwa, jumlah total penduduk 3.156.229 dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki sebanyak 20.037 jiwa (0,63%). Rasio yang berpendidikan, penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah juga lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan masing-masing untuk perempuan 19,92% untuk perempuan dan 8,35% untuk laki-laki.

Sementara itu, mengenai partisipasi anggota DPRD Provinsi DIY terhadap kesetaraan gender dalam proses pembangunan tergolong rendah. Pada dimensi kesetaraan gender dengan indikator partisipasi politik masih terbatas pada tataran wacana dan konsep belaka, pada implementasinya belum menunjukkan suatu tindakan yang benar-benar memberikan jaminan terwujudnya kesetaraan gender.<sup>1</sup>

Jenis kelamin juga dapat mempengaruhi salah satu aspek yakni kekerasan secara gender yang disebabkan oleh bias gender atau *gender related violence*. Bahwa kekerasan ini terjadi akibat adanya ketidaksetaraan kekuatan di masyarakat, misalnya pemerkosaan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ vital, kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitusi), kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk sterilisasi atau pemasangan

alat Keluarga Berencana (KB), kekerasan terselubung, pelecehan seksual. Pentingnya regulasi atau produk hukum yang mengatur kesetaraan gender dalam pemerintahan menjadi satu tugas penting. Dimana produk kebijakan terpenting yaitu Perda khusus untuk melindungi dan mengakomodir kepentingan perempuan sama sekali belum ada.<sup>2</sup>

Pembelaan terhadap hak-hak perempuan mulai diberlakukan dengan terbentuknya WOMEN in development (WID) dan merupakan pemecahan masalah perempuan Dunia Ketiga. Namun setelah berjalan selama sepuluh tahun, program ini menuai kritik keras dari aktivis feminisme. Karena dianggap sebagai alat propaganda Agenda Dunia Pertama untuk mendominasi Negara Dunia Ketiga. Agenda utama WID adalah bagaimana melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan. Karena menurutnya penyebab keterbelakangan perempuan disebabkan mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan.

Konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksikan secara sosial maupun kultural (Mansour Fakih :8).<sup>3</sup> Misalnya bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Terbentuknya perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan atau negara.

Kesenjangan gender di Indonesia masih relatif lebih besar dibanding negara ASEAN lainnya. Selain itu, tantangan lainnya adalah kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement).

Persentase anggota parlemen wanita di Indonesia setelah periode tahun 2002-2003 mengalami kecenderungan meningkat. Tahun 2008, Indonesia menjadi negara yang persentase anggota parlemen wanita paling rendah, sedangkan Vietnam tertinggi. Angka partisipasi perempuan dalam pendidikan tingkat menengah di Indonesia pada tahun 2007 hanya sebesar 66.0 %, lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga ASEAN lainnya, sementara itu, Thailand telah mencapai 88.0%, Malaysia 72.0%, dan Filipina mencapai angka 88.0%, meskipun demikian, ada peningkatan 6% dari tahun sebelumnya. Angka partisipasi perempuan dalam pendidikan tingkat tinggi di Indonesia pada tahun 2007 meningkat 3% dibandingkan tahun 2006, tetapi terendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya.<sup>4</sup>

Caplan (1987) dalam *The Cultural Construction of Sexuality* mengatakan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekedar biologis, namun melalui proses sosial dan kultural.

Oleh karena itu gender dapat berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin tidak.<sup>5</sup> Oleh karena itu, diangkatlah penelitian ini dengan judul "**Pengaruh Pengarusutamaan Gender Internasional terhadap Indonesia khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**"

#### **A. Tujuan Riset**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengarusutamaan gender Internasional terhadap Indonesia khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui Implementasi Instruksi Presiden No 9 Tahun 1999 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan sosial terutama di Provinsi DIY.

#### **B. Kontribusi Riset**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian dalam bidang Gender dan Politik terutama dalam pengembangan Ilmu Hubungan Internasional,
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi sebuah masukan dan juga rekomendasi terhadap perkembangan Gender Internasional terutama dampaknya bagi negara dunia ketiga yakni Indonesia khususnya Provinsi DIY.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, dalam masalah ini diuraikan pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana bentuk pengaruh pengarusutamaan gender Internasional terhadap Indonesia khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan konsep Gender di pemerintahan, namun tentunya dengan konsep, dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Chusnul Hayati (2006), dimana peneliti melihat Gender dan Perubahan Ekonomi : Peranan Perempuan Dalam Industri Batik di Yogyakarta 1900-1965. Peneliti menemukan bahwa kemerosotan ekonomi di DIY pada abad ke-19 telah membuat perempuan mengambil posisi untuk pencari nafkah melalui kerajinan batik. Industri dan perdagangan batik telah memberikan peluang ekonomi bagi perempuan.

Sementara penelitian ke-dua yang dilakukan oleh Mufidah Ch (2007), dimana peneliti melihat Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam konteks Sosial, Budaya dan Agama. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan berbagai macam hal sosial terkait Bias Gender yakni Realitas ketidakadilan sosial

di masyarakat, termasuk di dalamnya ketidakadilan gender terabaikan karena norma yang dibangun atas nama tafsir agama tidak dapat dipertemukan dengan realitas umat beragama. Bagi yang mempertahankan teks secara normatif, skripturalis akan terjebak pada sikap dualistik yakni, di satu sisi norma yang tidak boleh bergeser, di sisi lain realitas umat yang terus berkembang.

Penelitian ke-tiga yang dilakukan oleh Fahriah Tahar (2007), dimana peneliti melihat Pengaruh Diskriminasi Gender dan Pengalaman Terhadap Profesionalisme Auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profesionalitas auditor, sedangkan pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalitas auditor.

Penelitian ke-empat yang dilakukan oleh Farida Hanum (2010), dimana peneliti mengkaji Analisis Kesetaraan Gender di Pemerintahan Kabupaten Sleman DIY. Perbedaan intensitas dan ekstensitas dalam mengarusutamakan gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di K/L, provinsi, kabupaten/kota sehingga bias gender maupun netral gender masih mewarnai beberapa dimensi pembangunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia untuk mengintegrasikan isu gender kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, serta kurangnya komitmen para pemimpin K/L pemerintah dan daerah dalam pelaksanaan PUG.

Penelitian kelima oleh Yuni Lestari (2008) Persepsi dan Partisipasi Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kesetaraan Gender. Penelitian yang akan dilakukan ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian yang telah digambarkan di atas. Selain melakukan penelitian terhadap implementasi Gender secara teknis. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif untuk menganalisa Pengaruh Pengarusutamaan Gender Internasional Terhadap Indonesia khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## E. Kerangka Teoritis

### I. Teori Gender

Berdasarkan definisinya, konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural (Mansour Fakhir :8).<sup>6</sup> Misalnya bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Terbentuknya perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan atau negara.

Ada beberapa teori tentang Gender yang diklasifikasikan sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Teori Fungsionalisme yang dicetuskan oleh Miriam Johnson. Ia mengakui bahwa adanya pandangan berat sebelah yang tak sejajar dalam teori Parson

tentang keluarga dan kecenderungan fungsionalisme untuk meminggirkan masalah ketimpangan sosial, dominasi dan penindasan. Dalam pandangannya perempuan mengalami kerugian di dalam masyarakat karena pengaruh patriarki yang ada di dalam keluarga.

2. Teori Konflik Anaitik yang menganalisis gender berdasarkan perspektif teori konflik yakni Janet Chafetz. Pendekatan yang dilakukannya lintas kultural dan historis dan mencoba merumuskan teori gender di dalam masyarakat dalam pola-pola khusus. Ia menyebutkan bahwa ketimpangan gender berasal dari stratifikasi jenis kelamin. Wanita mengalami kerugian paling sedikit jika dapat menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga dan kebebasan berperan dalam produksi ekonomi secara signifikan.
3. Teori Sistem Dunia, dalam teori ini memandang kapitalisme global di seluruh fase historisnya sebagai sebuah sistem untuk dijadikan sasaran analisis sosiologi. Menurut Kathryn B. Ward sistem dunia tak dapat dipahami kecuali bila tenaga kerja rumah tangga dan sektor informal diperhitungkan dalam analisis dan karena proporsi wanita banyak terdapat di kedua sektor tersebut maka wanita perlu mendapat perhatian khusus.

Menurut Riant Nugroho (2008) gerakan kaum perempuan pada hakekatnya adalah gerakan transformasi dan bukanlah gerakan untuk membalas dendam kepada kaum lelaki. Artinya gerakan transformasi perempuan adalah suatu proses pergerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia (laki-laki dan perempuan) agar lebih baik baik dan baru yang meliputi hubungan ekonomi, politik, kultural, ideologi, lingkungan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu pandangan kritis juga dinyatakan oleh Hillary M.Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex&Gender*, yang mendefinisikan bahwa gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectation for women and men*).<sup>8</sup> Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Dimana ada dua elemen yang mendasar yakni gender tidak identik dengan jenis kelamin dan gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat (Gallery,1987).<sup>9</sup>

Upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan di Indonesia telah dilakukan lebih dari satu dasarwarsa. Terbitnya INPRES No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menjadi satu titik tolak kebijakan yang sangat penting dalam mendorong upaya tersebut. Kebijakan ini kemudian dipertegas juga dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2011 tentang RPJMN 2010-2014 yang menetapkan gender sebagai salah satu isu lintas bidang yang harus diintegrasikan dalam semua bidang pembangunan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA)

menjadi satu lembaga yang diharapkan berperan penting dalam mendukung keberhasilan upaya tersebut melalui fungsi koordinasi, advokasi dan fasilitasi yang dimilikinya.

Sejak beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan banyak upaya mendorong implementasi Anggaran yang Responsif Gender (ARG), yang dimulai dengan dikeluarkan PMK 109/2009 dengan tujuh kementerian negara/lembaga sebagai pilot di dalam melaksanakan ARG di tahun 2010.

PMK 109/2009 diperbarui dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.104/PMK 02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2011 dengan fokus pelaksanaan ARG di sektor-sektor ekonomi, politik dan sosial. Perencanaan yang responsif gender dilakukan dengan memasukkan perbedaan pengalaman, spirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada.<sup>10</sup>

Kiritikan terhadap wanita secara sosial berakar pada sektor domestik, yakni institusi keluarga. Sama juga halnya dengan teori yang disampaikan oleh Socrates untuk menghilangkan keluarga konvensional. Seorang pemikir feminis teoritis awal Jhon Stuart Mill pada tahun 1869 mengemukakan bahwa pekerjaan perempuan di sektor domestik, sebagai pekerjaan yang irasional, emosional dan tiranis.

## 2. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional).

Pada Konferensi Perempuan IV di Beijing tahun 1995, Platform of Action secara tegas para partisipan mendukung konsep gender mainstreaming dengan menyatakan bahwa pemerintah dan para pengambil keputusan harus terlebih dahulu secara aktif mempromosikan rencana kebijakan-kebijakan dan program yang berspektif gender. Dan mengintegrasikan kebijakan gender dalam empat tahap manajemen yang berkesinambungan yaitu organisasi dan lembaga perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari tingkat nasional, propinsi, hingga kabupaten/kota secara berkelanjutan.

Permasalahan Gender menjadi sebuah kajian yang sangat menarik, dimana didalamnya ada beberapa ciri yang dilakukan untuk Mengidentifikasi Isu Strategis

Gender, yakni :

- a. Menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan
- b. Adanya ketimpangan kondisi (perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol, manfaat) antara laki-laki dan perempuan
- c. Adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan: diskriminasi, marginalisasi, subordinasi (bentuk dan akibat yang ditimbulkan)
- d. Ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur eksternal dan internal pemerintah)
- e. Cakupan luas (dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat)
- f. Mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan
- g. Efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain)
- h. Berorientasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-laki dan perempuan.

Anggaran Responsif Gender(ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses,manfaat,berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.<sup>11</sup>

Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumberdaya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

## 3. Perspektif Feminis Terhadap Gender

Didalam Hubungan Internasional, gerakan feminisme berkembang semakin pesat. Dimana gerakan ini menuntut secara de facto hak-hak wanita untuk lepas dari penindasan dan ketidakadilan. Feminisme adalah pendekatan akademis yang melihat melalui lensa gender untuk memahami lebih jauh tidak hanya tentang perempuan dan gender, tetapi juga bagaimana perempuan dan gender mampu menolong untuk mempelajari lebih luas tentang dunia secara umum. Didalam feminisme ada banya aliran yang berkembang, yakni :<sup>12</sup>

- a. Feminis Liberal yang menyatakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender akan bisa dicapai dengan menghapuskan hambatan yang bersifat regulatif, yang membedakan hak laki-laki dan perempuan.
- b. Feminis Konstruktivis berfokus pada gender sebagai gagasan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh politik internasional.

- c. Feminis Post-Strukturalis fokus kajiannya pada konstruksi performatif dan linguistik serta bagaimana relasinya dalam gender.
- d. Feminis Post-Modern secara kritis menginvestigasi kategori yang dianggap natural alamiah seperti kategori perempuan dan gender, serta bagaimana kategori-kategori tersebut dipetakan dalam politik global.
- e. Feminis Post-Kolonial mengkaji secara kritis bagaimana karakter/nuansa dari dominasi dan subordinasi dibawah imperialisme dan kolonialisme.

Banyak ditemukan ketidakadilan pada kaum perempuan, yakni terjadinya pemiskinan terhadap kaum perempuan, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu, kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, perempuan mendapat beban kerja lebih banyak. Hal ini sejajar dengan teori Marx yang mengatakan bahwa kekuasaan adalah identik dengan tiran, dan perempuan juga harus meraih kebahagiaan. Standarnya adalah kebahagiaan materialistis maskulini, yaitu standar yang bersumber pada dunia publik dan aspek rasionalitas manusia.

Feminisme awalnya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta merupakan usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Feminitas adalah ideologi yang berciri kedamaian, keselamatan, kasih dan kebersamaan. Sedangkan maskulinitas memiliki karakter persaingan, dominasi, eksploitasi dan penindasan.

Bagi feminis Marxis penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi, sehingga persoalan perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme. Engels menganggap bahwa terpuruknya status perempuan bukan karena perubahan teknologi, melainkan karena perubahan organisasi kekayaan.

Gerakan feminis muncul di Amerika sebagai bagian dari kultur radikal termasuk gerakan hak-hak sipil dan kebebasan seksual. Gerakan ini menggema pada tahun 60-an hingga menjangar sampai ke Eropa, Kanada dan Australia. Golongan liberalis berasumsi bahwa kebebasan dan keadilan berasal dari rasionalitas dan perempuan juga sebagai makhluk yang rasional. Dan penyebab ketidak mampuan kaum perempuan bersaing dengan laki-laki akibat rasionalitas yang rendah. Sementara kaum radikal beranggapan bahwa penindasan terhadap perempuan adalah akibat dominasi kaum laki-laki. Feminisme telah membawa perubahan positif bagi perempuan terutama di dunia politik.

## F. Hipotesa

Pengaruh gerakan Gender internasional telah melahirkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional untuk mengatur upaya-upaya menuju

pembangunan yang berkeadilan dan inklusif yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

## II. METODELOGI PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Prasetyo dan Jannah (2012) bahwa penelitian deskriptif ini adalah "sebuah penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena". Tujuannya adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengarus-utaman Gender di Provinsi DIY.

### 2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi DI Yogyakarta.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu:

#### a. Dokumen

Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dokumen dalam bentuk gambar/foto yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai segala hal yang berkenaan dengan Gender yang terjadi di Provinsi DIY atau tingkat internasional.

#### b. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data observasi ini, penulis lakukan untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap Gender di Provinsi DIY.

#### c. Wawancara

Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini pihak Pemprov DIY/Instansi terkait.

### 4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian tentang kesetaraan gender masuk ke dalam perkembangan kajian keilmuan HI dengan menjadikan individu sebagai aktor penting disamping negara. Ketidaksetaraan gender dapat menurunkan kesejahteraan dan menghambat pembangunan yang akan merugikan masyarakat baik laki-laki, perempuan dan anakanak yang akan memiliki dampak terhadap kemampuan mereka meningkatkan taraf kehidupan. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana pengaruh Pengarusutamaan Gender Internasional terhadap Indonesia dan Provinsi DIY.

#### A. Pengaruh Pengarusutamaan Gender di Tingkat Nasional

Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional).

Pada Konferensi Perempuan IV di Beijing tahun 1995, Platform of Action secara tegas para partisipan mendukung konsep gender mainstreaming dengan menyatakan bahwa pemerintah dan para pengambil keputusan harus terlebih dahulu secara aktif mempromosikan rencana kebijakan-kebijakan dan program yang berspektif gender. Dan mengintegrasikan kebijakan gender dalam empat tahap manajemen yang berkesinambungan yaitu organisasi dan lembaga perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari tingkat nasional, propinsi, hingga kabupaten/kota secara berkelanjutan.

Secara tegas, upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender ini juga terlihat dalam Konteks Internasional, yaitu telah diratifikasinya Konvensi CEDAW (The Convention on Elimination of Discrimination Against Women) yaitu konvensi mengenai penghapusan segala bentuk

diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1984 dan ditetapkan dalam Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1984.

Landasan Hukum Nasional<sup>13</sup> dari Konsep Gender di Indonesia :

- a) Undang Undang Dasar 1945, Pasal 27, 28 A-J tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara (equal rights, non discrimination).
- b) Undang Undang, Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) (di dalam keluarga, masyarakat dan negara)
- c) Undang Undang, Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang Undang, Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- f) Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- g) Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 ,yang mengamanatkan agar gender diarusutamakan.
- h) Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/PMK 02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010.
- i) Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.02/2010 tentang hal yang sama untuk tahun anggaran 2011 dan agar penerapan ARG dilakukan di bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi.
- j) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2010-2014.
- k) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Perdagangan.

Masalah keadilan dan kesetaraan gender tertuang dalam berbagai kebijakan. *Pertama*, Peraturan Presiden No 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) Tahun 2004 - 2009. (Bapenas, 2005.). *Kedua*, upaya peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam pemerintah SBY – Kalla juga tertuang dalam Rancangan Pembangunan Nasional Transisi Tahun 2005 – 2006. (Bapenas, 2005.). *Ketiga*, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan 2005 -2009. (Menegpp.go.id) dan *Keempat*, Upaya ini juga tertuang dalam kebijakan kementerian pemberdayaan perempuan berkaitan dengan program 100 Hari Pemerintahan SBY-Kalla. (Kompas, 24 Desember 2005).<sup>14</sup> Beberapa Kesepakatan Nasional yang berhasil dibuat sebagai berikut:

1. UU No. 7/2004 tentang Penghapusan Perlakuan Diskriminasi terhadap Perempuan (ratifikasi terhadap konvensi CEDAW) : Pemerintah Indonesia mengikat diri dalam kewajiban untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan melalui berbagai cara dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender secara berkesinambungan
2. Inpres 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional : menginstruksikan kepada seluruh K/L untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di seluruh aspek pembangunan.
3. Inpres 3/2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, khususnya yang terkait dengan percepatan pencapaian MDG's
4. Kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia tahun 2004, angka Human Development Index (HDI), angka Gender-related Development Index (GDI) dan angka Gender Empowerment Measurement (GEM) masing-masing adalah 65,8, 59,2 dan 54,6. Tingginya angka HDI dibandingkan dengan angka GDI menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender, atau masih terdapat kesenjangan gender.
5. Sementara itu, rendahnya angka GEM menunjukkan bahwa partisipasi dan kesempatan perempuan masih rendah di bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Angka GDI Indonesia tersebut menempati peringkat ke-90, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Selanjutnya, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2004 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah yaitu 49,2 persen, dibandingkan dengan laki-laki 86,0 persen. Kontribusi penduduk perempuan dalam pekerjaan upahan (wage employment) di sektor non-pertanian juga masih rendah yaitu 28,3 persen pada tahun 2002.

Beberapa Kesepakatan Nasional terhadap Gender:

1. UU No. 7/2004 tentang Penghapusan Perlakuan Diskriminasi terhadap Perempuan (ratifikasi terhadap konvensi CEDAW) : Pemerintah Indonesia mengikat diri dalam kewajiban untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan melalui berbagai cara dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender secara berkesinambungan
2. Inpres 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional : menginstruksikan kepada seluruh K/L untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di seluruh aspek pembangunan

3. Inpres 3/2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan : khususnya yang terkait dengan percepatan pencapaian MDG's.

### B. Gender Budgeting Dalam APBD DIY

*Gender Budgeting* pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 2000 oleh LSM Internasional yang memberikan pelatihan dan sumber daya bagi NGO di Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan ini. Jumlah yang dianggarkan pada Dana Responsif Gender untuk Bidang Pemberdayaan Perempuan, menurut hemat penulis adalah salah satu bentuk keterbukaan dari Pemerintah Propinsi DI Yogyakarta, yang menginginkan lahir-lahirnya perempuan untuk mengisi sektor pembangunan. Hal ini terlihat dari perhatian penuh pemerintah dalam memberikan anggaran untuk program pendidikan dan politik bagi perempuan di wilayah DI Yogyakarta. Jika dilihat dari analisa diatas, dapat memberikan gambaran bahwa Propinsi DI Yogyakarta yang secara garis budaya sangat menempatkan laki-laki sebagai pemimpin, di era reformasi ini memperlihatkan geliatnya.

Kemudian sejak itu, berbagai kegiatan di bawa payung *gender budgeting* telah dilaksanakan di tingkat kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Ini dibuktikan diterbitkannya dengan Keputusan Presiden No. 9/2000 dan Keputusan Menteri No. 132/2003, meskipun tidak dimaksudkan untuk memperkenalkan *gender budgeting*, telah membuat peraturan-peraturan yang dapat mendukung alokasi-alokasi anggaran yang responsif gender.

Di negara-negara berkembang dan di negara-negara maju, perubahan-perubahan telah diperkenalkan untuk menilai dan mengevaluasi anggaran kinerja mereka. Sayangnya sistem anggaran kinerja ini jarang sekali mencakup kriteria-kriteria kinerja yang cukup menggambarkan dan sensitif gender. Karakteristik anggaran responsif gender adalah bahwa anggaran-anggaran tersebut berusaha untuk memperbaiki hasil-hasil anggaran secara umum, kesetaraan dan pemberdayaan perempuan secara khusus. Dengan berfokus pada masalah-masalah ekonomi dan sosial yang seringkali diabaikan atau kurang diperhatikan dalam anggaran konvensional, analisa kebijakan dan pengambilan keputusan.

Masalah-masalah ini mencakup peranan pekerjaan yang tidak dibayar (*unpaid work*) dan dalam ekonomi keluaran-keluaran sosial, khususnya tanggung jawab yang tidak proporsional bagi perempuan untuk pekerjaan yang tidak dibayar, distribusi sumber-sumber diantara keluarga, dampak pajak dan belanja bagi perempuan miskin dan tanggungan mereka. Berdasarkan Tap MPR No. 5/MPR/2003 poin c Tentang alokasi minimum 5% dana APBN/APBD untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan Keputusan Mendagri No. 132/ 2003 Tentang pedoman umum PUG di daerah.

Sementara itu, disisi lain Pemerintah Propinsi DI Yogyakarta menurut Penulis telah memberikan ruang

yang besar bagi perkembangan kesetaraan Gender di dalam sistem pemerintahan. Hal ini secara de facto tertuang dari besarnya jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD DIY. Dan dari penetapan anggaran di pos kegiatan berikut ini terlihat jelas bentuk perhatian Pemerintah Propinsi DI Yogyakarta melalui uraian berikut :

1. Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Sinkronisasi Program Kegiatan Urusan PP, PM dan KB
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
3. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT
4. Akreditasi Kecamatan Sayang Ibu
5. Peningkatan Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
6. Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
7. Updating Database Perlindungan Perempuan Dan Anak
8. Pelatihan Penyusunan Data Gender dan Anak DIY
9. Pengembangan sistem informasi gender dan anak
10. Updating data terpilah gender dan anak
11. Fasilitasi forum perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
12. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
13. Integrasi gender dalam bencana
14. Pelatihan PPRG
15. Pemberdayaan lembaga yang berbasis pada kesetaraan gender
16. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
17. Penguatan organisasi perempuan
18. Pembinaan organisasi perempuan
19. Peringatan hari besar perempuan
20. Pengembangan materi dan pelaksanaan tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
21. Pengembangan materi kie tentang kb dan pemberdayaan masyarakat
22. Program peningkatan partisipasi ekonomu perempuan
23. Pengembangan desa prima (perempuan indonesia maju mandiri)
24. Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
25. Peningkatan kapasitas buruh perempuan dalam bidang ekonomi
26. Program pendidikan politik bagi perempuan
27. Pelatihan dan pendidikan politik berwawasan gender

28. Peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
29. Peningkatan kapasitas perempuan anggota partai politik
30. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Budaya Jawa yang identik dengan perempuan sebagai second sex, dan lebih dominan hanya mengurus rumah tangga, ternyata mendapatkan ruang yang cukup luas di dalam pembangunan. Tentunya hal ini menjadi sebuah respon positif, dari geliat Gender Mainstream yang selama ini diperjuangkan oleh kaum feminis di tingkat internasional. Tinggal bagaimana Anggaran yang sudah diwacanakan dalam APBD Propinsi DI Yogyakarta tahun 2014 ini dapat tersalurkan atau sampai tepat pada sasarannya.

Dan memberikan sinyal positif bagi para aktivis perempuan di Yogyakarta untuk dapat memanfaatkan peluang ini. Terutama penguatan di bidang pendidikan, kelembagaan, organisasi, sosialisasi. Agar perempuan yang berada di wilayah DI Yogyakarta menyadari peranan dan fungsinya tidak hanya sebagai isteri, tapi juga sebagai perempuan yang bermartabat. Dan mampu mengisi pemerintahan dan pembangunan serta berperan aktif untuk ikut andil dalam dunia politik.

### **C. Pengaruh Pengarus-Utamaan Gender di Tingkat Internasional, Nasional dan Lokal**

Dalam hal ini Pengarusutamaan Gender Internasional telah memberikan dampak positif terhadap Indonesia dan Provinsi DIY. Berikut uraiannya dibawah :

1. Tingkat Internasional
  - a) CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination against Women) : kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus didisain untuk melindungi hak-hak perempuan dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender (laki-laki dan perempuan)
  - b) Beijing Platform of Action : teridentifikasinya 12 bidang yang harus menjadi perhatian dalam pemajuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (antara lain kemiskinan, ekonomi, pengambilan keputusan, lingkungan hidup).
  - c) Millenium Development Goals (MDG's) : persamaan gender dalam pengertian kesetaraan dan keadilan gender ditetapkan sebagai salah satu dari 8 sasaran pembangunan MDG's
2. Tingkat Nasional
  - a) Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
  - b) UU No 25 tentang Program Pembangunan Nasional –PROPENAS 2000 - 2004
  - c) Intruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang



- Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan
- d) UU Partai Politik yang memasukkan unsur 30 Persen keterwakilan perempuan
- e) UU Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- f) UU PPTKILN
- g) Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Kalla
- h) Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) Tahun 2004 – 2009
- i) Rancangan Pembangunan Nasional Transisi Tahun 2005-2006 Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2005 -2009

3. Tingkat Lokal (Provinsi DIY)
  - a. Adanya Kecamatan Sayang Ibu
  - b. Pelatihan Anggaran Responsif Gender.
  - c. Anugrah Parahita Ekapraya(APE) untuk kota Jogjakarta dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (tahun 2014).
  - d. Anugrah Parahita Ekapraya(APE) Madya untuk kabupaten Bantul dari Presiden SBY (tahun 2013).
  - e. Adanya kampung ramah anak

#### **D. Dampak Pengarusutamaan Gender di Dinas Pekerja Umum dan ESDM Provinsi DIY**

Tujuan umum dari PUG-PU adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan pemukiman telah responsive gender, artinya tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PU dan pemukiman serta dalam meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PU dan pemukiman<sup>15</sup>. Tujuan khusus yakni :

1. Memastikan bahwa seluruh jajaran Dinas PUP-ESDM DIY telah memahami konsep, prinsip dan strategi pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Pemukiman.
2. Memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Pemukiman responsive gender.
3. Memastikan adanya berkelanjutan , pelestarian dan pengembangan kualitas penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan infrastruktur PU dan pemukiman.

Sasaran pelaksanaan PUG Terintegritasnya perspektif gender ke dalam internal budaya Dinas PUP-ESDM DIY sehingga menghasilkan budaya lembaga yang peka terhadap isu gender, antara lain :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan staf Dinas PUP-ESDM DIY untuk melaksanakan PUG di bidang tugasnya.

2. Pelaksanaan pembinaan SDM yang responsif gender.
3. Penyediaan prasarana dan sarana gedung Dinas PUP-ESDM DIY yang responsif gender

Terintegrasinya perspektif gender ke dalam seluruh proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Pemukiman sehingga menghasilkan infrastruktur PU dan Pemukiman yang responsif gender :

1. Tahap perencanaan dan pemograman
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap pemantauan dan evaluasi

Program pembangunan berbasis gender yang sudah dilakukan Dinas PU dan ESDM DIY:

1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
2. Peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP)-Loan
3. Penyediaan air baku
4. Pembangunan infrastruktur perkotaan
5. Pembangunan infrastruktur pedesaan
6. Pengembangan sistem distribusi air minum
7. Penyediaan prasarana dan saranaair limbah
8. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
9. Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan kumuh
10. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan

Bentuk standarisasi pemnagunan berbasis gender yakni Peraturan Gubernur DIY No 116 tahun 2014 tentang pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender. Kendala yang ditemukan selama proses pelaksanaan pembangunan berbasis gender :

1. Minimnya ketersediaan data pilah
2. Pemahaman PUG-ARG-GBS-GAP
3. Metode/Tools monitoring dan evaluasi
4. Manfaat PPRG dalam penajaman kualitas perencanaan, penganggaran dan perbaikan layanan publik belum dirasakan secara nyata
5. Belum optimalnya efektivitas koordinasi kelembagaan PPRG
6. Belum memadainya perangkat pendukung PPRG

Contoh proyek fisik yang sudah berhasil dilakukan dalam pembangunan berbasis gender di DIY :

1. Kamar mandi/WC terpisah antara laki-laki dan perempuan
2. Jalan akses untuk orang berkebutuhan khusus
3. Ruang pengasuhan anak (RPA) bagi karyawan DPUP-ESDM DIY
4. Meja kerja kantor (depan tertutup)

Bentuk koordinasi dengan kabupaten/kota yakni melalui rapat koordinasi kab/kota.

## IV. KESIMPULAN

Kesetaraan Gender dan Pendidikan merupakan salah satu capaian kunci untuk Indonesia. Target MDG untuk kesenjangan gender dalam APM berada pada jalur pencapaian di 2015, utamanya apabila kesenjangan di tingkat propinsi teratasi. Fokus saat ini adalah pada langkah-langkah sistemik untuk menaikkan akses terhadap peningkatan *outcome* dari pendidikan yang lebih responsif gender. Tantangannya tetap pada pengarusutamaan perspektif gender dalam pendidikan, melibatkan penaksiran implikasi dari berbagai aksi pendidikan yang direncanakan (legislasi, kebijakan atau program) terhadap anak-anak laki-laki dan perempuan, di keseluruhan area dan tingkat.

Uji coba yang dilakukan di 7 kementerian menunjukkan hasil yang positif, termasuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan dari Kementerian Pertanian dan Program Pencapaian Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Publik dari Kementerian Kesehatan, (KPPPA, 2010). Lembaga lain juga telah secara formal membangun komitmen terhadap pengarusutamaan gender. Sejumlah pemerintah lokal telah mulai menggunakan analisis gender dalam menyusun anggaran mereka. Pemerintah lokal di Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera kini bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan analisis gender di beberapa sektor, seperti kesehatan dan pendidikan, dengan melihat bagaimana anggaran untuk sektor-sektor tersebut dapat mengurangi kesenjangan gender yang ada.

Adanya keharusan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses Musrenbang ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota, yang diatur dalam Surat Edaran Bersama tahunan yang diterbitkan oleh Menteri Bappenas dan Kemendagri, menyediakan lebih banyak peluang untuk memasukkan kepentingan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan. Pemerintah dan mitra pembangunan bilateral sepakat untuk meningkatkan efektivitas bantuan (*aid effectiveness*), termasuk menyelaraskan pendekatan kesetaraan gender.

Inpres No. 9 tahun 2000 Diinstruksikan kepada

Menteri, Kepala LPND, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI, Gubernur, dan Bupati/Walikota agar: Melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi atas Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Pengarusutamaan Gender adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam kebijakan dan program pembangunan nasional (dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi).

Upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan di Indonesia telah dilakukan lebih dari satu dasarwarsa. Terbitnya INPRES No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menjadi satu titik tolak kebijakan yang sangat penting dalam mendorong upaya tersebut. Kebijakan ini kemudian dipertegas juga dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2011 tentang RPJMN 2010-2014 yang menetapkan gender sebagai salah satu isu lintas bidang yang harus diintegrasikan dalam semua bidang pembangunan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) menjadi satu lembaga yang diharapkan berperan penting dalam mendukung keberhasilan upaya tersebut melalui fungsi koordinasi, advokasi dan fasilitasi yang dimilikinya.

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada.<sup>16</sup> Kiritikan terhadap wanita secara sosial berakar pada sektor domestik, yakni institusi keluarga. Sama juga halnya dengan teori yang disampaikan oleh Socrates untuk menghilangkan keluarga konvensional. Seorang pemikir feminis teoritis awal Jhon Stuart Mill pada tahun 1869 mengemukakan bahwa pekerjaan perempuan di sektor domestik, sebagai pekerjaan yang irasional, emosional dan tiranis.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yuni Lestari (2008) Persepsi dan Partisipasi Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kesetaraan Gender
- [2] Machiya Astuti (2010) Implikasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan Bagi Pemenuhan

- Kepentingan Perempuan (studi pada Perempuan DPRD DIY)
- [3] Mansour Fakih (1996) Analisis Gender & Transformasi Sosial.
- [4] <http://www.ristek.go.id/file/upload/Referensi/2010/indikator/C6%20Gender.pdf>
- [5] Mansour Fakih Fakih.. "Analisis Gender &

---

Transformasi Sosial”, 1996. hlmn 72

[6] Ibid

[7] George Ritzer. “Teori Sosiologi Modern”. 2004. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hlm 407.

[8] Riant Nugroho. “Gender dan Strategi Pngarus- Utamaannya di Indonesia”. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2011.

[9] ibid

[10] ibid

[11] Anggaran Responsif Gender dan Penyusunan Gender Budget Statement oleh Direktorat Jendral Anggaran-Kementrian Keuangan tahun 2012, [http://www.bappenas.go.id/files/6513/5027/4523/arg--penyusunan-gbs\\_\\_20120720144840\\_\\_0.pdf](http://www.bappenas.go.id/files/6513/5027/4523/arg--penyusunan-gbs__20120720144840__0.pdf)) diakses 10 Juni 2015

[12] Anie Sutripto. “Gender&Hubungan Internasional”, 2013. hlmn 11

[13]

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/06/perencanaan-penganggaran-responsif-gender-id0-1354732924.pdf>

[14] Eko Bambang Subiyantoro. Sensitivitas Gender Kebijakan Pemerintahan SBY. Policy Assessment Juni 2005. The Indonesian Institute

[15] Hasil wawancara Sekretaris Dinas PU dan ESDM Provinsi DIY.

[16] Riant Nugroho. Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2011. halaman 6